



Berdaya untuk Sejahtera

Fokus Pemprov Tujuh Tahun Keistimewaan DIJ

JOGJA, Radar Jogja - Keistimewaan Jogjakarta sudah berlangsung selama tujuh tahun. Selama kurun waktu itu, keistimewaan dinilai belum memberi dampak signifikan untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan di Jogjakarta.

Terhitung sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

DIJ, dana triliunan rupiah telah digelontorkan pemerintah pusat untuk Jogjakarta melalui Pemprov DIJ.

Saat ini angka kemiskinan berada di angka 11,7 persen atau 446 ribu jiwa penduduk. Sementara itu, ketimpangan yang terjadi di DIJ masih paling tinggi di Indonesia dengan angka 0,423.

Melihat keadaan tersebut, pemprov bertekad program danais yang digelontorkan lebih ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Hal itu dilakukan melalui program-program pemberdayaan ▸ *Baca Berdaya... Hal 11*

Gubernur DIJ Hamengku Buwono X menjelaskan, progresivitas penurunan kemiskinan melalui program danais tidak bisa dilakukan dalam sekejap.

Namun, dia melihat ada penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun.

Menurutnya, pada 2016 tercatat kemiskinan di angka 488 ribu. Angka itu menurun menjadi 446 ribu hingga tahun ini.

"Danais itu kan tidak bisa diberikan langsung kepada rakyat. Jadi, harus melalui program. Bagaimana program melalui danais bisa membuat masyarakat sejahtera," kata HB X beberapa waktu lalu.

HB X menegaskan, kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi perhatian serius yang terus digarap oleh pemprov. Penurunan kemiskinan dan ketimpangan tersebut telah dituangkan dalam RPJMD lima tahun men-

datang. "Itu artinya APBD dan danais yang ada, diperuntukkan untuk itu. Dan, OPD harus saling bekerja sama untuk merealisasikan hal itu," katanya.

Sekprov DIJ Gatot Saptadi menilai capaian DIJ terbilang baik. Dari sisi akuntabilitas, ujarnya, capaian DIJ cukup baik dibandingkan provinsi lain penerima dana dari pemerintah pusat.

Termasuk, lanjutnya, penyerapan anggaran dan perencanaan sudah sesuai ketentuan yang diharapkan pemerintah pusat. "Dari *outcome kan debatable*. Biar rakyat menilai," katanya.

Panindrya Keistimewaan Beny Susanto menjelaskan, Pemprov DIJ telah bercermin dari dinamika pemanfaatan danais selama tujuh tahun ini. Itu mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 bahwa keistimewaan akan dikembalikan pada mandat UU 13/2012.

"Danais ikut memberikan stimulus penurunan kemiskinan

yang diamanatkan dalam RPJMD sebesar 7 persen," kata Beny ditemui di ruang kerjanya kemarin (30/8).

Dia mencontohkan, sebelumnya danais di sektor kebudayaan lebih banyak ditujukan pada perhelatan kebudayaan. Kini anggaran akan ditujukan pada pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, pertunjukkan kebudayaan yang selama ini dibiayai danais masih pada tatanan permukaan saja. Pertunjukkan belum mencerminkan pemanfaatan danais yang sebenarnya.

Dia mencontohkan pertunjukkan wayang yang digelar masyarakat. Pertunjukkan itu juga harus bisa memberi efek kesejahteraan pada masyarakat.

"Kalau *nanggap* wayang, jangan dominasi satu dalang saja. Kita *kan* punya lima ratus dalang. Bisa tidak, mencakup semuanya karena kalau digerakkan akan sangat baik baik ekonomi," paparnya.

Jumlah danais khusus sektor kebudayaan masih di bawah anggaran untuk tata ruang. Tahun anggaran 2019, pagu anggaran untuk tata ruang sebesar Rp 660,4 miliar. Realisasi yang sudah berjalan sebesar Rp 254,3 miliar.

Sedangkan alokasi untuk bidang kebudayaan dalam beberapa tahun terakhir mendapat porsi terbesar. Tahun ini realisasi anggaran tahap dua hingga Mei sebesar Rp 39,1 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 496,6 miliar.

"Bukannya yang *nanggap-nanggap* itu salah. Tapi, kami memikirkan esensi program untuk menyejahterakan rakyat," ujarnya.

Pemanfaat danais mulai tahun ini pun difokuskan berbasis kewilayahan. Kegiatan yang dilaksanakan tidak lagi bertumpu pada program pemprov. Kegiatan dalam ruang lingkup rukan tetangga, rukun warga, kelurahan, dan kecamatan di-

selenggarakan oleh tingkat kabupaten dan kota.

Tahun ini dua wilayah yakni Gunungkidul dan Kulonprogo telah mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Dua kabupaten tersebut mendapatkan anggaran BKK sebesar Rp 190 miliar.

Gunungkidul mendapatkan jatah sebesar Rp 127 miliar. Sisanya untuk Kulonprogo.

"Pada 2020 semua kabupaten/kota sudah mendapatkan program ini. Artinya, mereka juga bertanggung jawab dalam pengentasan kemiskinan di wilayahnya," katanya.

Keberadaan BKK membuat

akses untuk penggunaan danais hingga level terendah tidak sulit. Setiap program usaha dari tingkat terbawah kini ditangani kabupaten dan kota.

"Akibatnya, bupati maupun wali kota mesti mengetahui program kebijakan daerahnya untuk urusan keistimewaan," jelasnya.

Peran pemprov dalam penggunaan danais di masa depan pun berubah. Pemprov bakal berpegang pada program yang ada di kabupaten dan kota. "Program provinsi yang berpegang pada program OPD (organisasi perangkat daerah) DIJ," terangnya.

Beny menjelaskan, sampai Mei lalu realisasi kinerja danais se-

besar Rp 301 miliar dari pagu anggaran Rp 1,2 triliun. Realisasi keuangan sebesar 31,39 persen dan fisik sebesar Rp 62,25 persen. "Tahun ini penyerapan 98,28 persen sehingga ada silpa Rp 38 miliar," terangnya.

Selain penyerapan danais di sektor tata ruang dan kebudayaan, sejumlah sektor lain juga menyedot anggaran danais. Meski, jumlahnya tak sebesar dua bidang tersebut. Di sektor pertanian, realisasi anggaran hingga Mei sebesar Rp 4,4 miliar dari pagu Rp 27,15 miliar. Untuk kelembagaan, serapannya sebesar Rp 3,35 miliar dari pagu 15,7 miliar. (bhn/amd/by)

Halaman: 30001 Hari: Sabtu Tanggal: 31-08-2012

Meneguhkan Semangat Memajukan Jogjakarta

HARI ini (31/8) masyarakat Jogjakarta diingatkan dengan Hari Keistimewaan, seiring disahkannya Undang-Undang Kesitimewaan DIJ tahun 2012 lalu. Tahun ini peringatan hari keistimewaan dilakukan secara sederhana.

Meski diperingati secara sederhana, Kepala Seksi Sejarah Dinas Kebudayaan DIJ Gede Adiatmaja menyatakan, peringatan keistimewaan bisa meneguhkan kembali semangat untuk memajukan Jogjakarta bersama. Lahirnya UU Keistimewaan DIJ sebagai penguatan keistimewaan dalam urusan kebudayaan, bukan tahap akhir dari perjuangan.

▶ Baca Meneguhkan... Hal 1



KEKUATAN BUDAYA: Seni tradisi menjadi salah satu kekuatan dan daya tarik orang dari luar daerah maupun manca untuk datang ke Jogja.

SUNTUK ADA TIRTANARAGAR JOGJA

Sambungan dari hal 1

"Tetapi untuk menatap masa depan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat *gemah ripah loh jinawi, tata titi tentrem karta raharja*," kata Gede Adiatmaja dalam keterangannya di Kantor Pawiyatan Pamong, Gedung Punokawan Jogja (28/8).

Apalagi, Gubernur DIJ HB X secara tegas dalam penyampaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk menyongsong abad samudra. Di mana pembangunan akan menghadap selatan Jogjakarta yang selama ini kerap terabaikan.

Menurutnya, kondisi itu mengajak masyarakat mengakrabi alam kehidupan perekonomian, yakni pertanian dan perdagangan melalui laut. "Among tani dagang layar pernah ditekuni nenek moyang kita," jelasnya.

Pada peringatan keistimewaan tahun ini, Disbud DIJ bekerja sama dengan Pawiyatan Pamong dan Paniradyo Keistimewaan, menggelar diskusi yang melibatkan para *stakeholder* dan pemerintah daerah. Tema yang diangkat yakni 50 tahun wajah DIJ di masa depan untuk mewujudkan kemuffaan martabat manusia Jogja untuk Indonesia dan dunia.

Sementara itu Sekretaris Pawiyatan Pamong Fajar Sudarwo menjelaskan, peringatan Hari Keistimewaan DIJ dan Amanat 5 September ini akan dikemas dalam satu paket kegiatan berisi sarasehan dan hiburan. Gubernur diharapkan bisa menghadiri sarasehan ini sebagai narasumber utama, diikuti perwakilan seluruh pemerintahan dan kalangan milenial, Sabtu (31/8).

Disamping program untuk mendukung peradaban baru Samudera Hindia, Sudarwo mengatakan dalam kurun waktu ke depan akan dibangun kampung-kampung atau desa-desa maritim. Kemudian desa-desa penyanggah kemaritiman, dan desa-desa pendukung kawasan kemaritiman di sepanjang pesisir selatan DIJ. "Ini bukan sekadar membangun pantai, tetapi juga kelembagaan kemaritiman," katanya. (bhn/laz/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005